

**KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

AYU SETIANI

NPM. 1621020171

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

AYU SETIANI

NPM. 1621020171

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok kearah pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Kepemimpinan adat Pepadun memiliki ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisional yang menganut pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang berdasarkan garis keturunan. Masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan adat Lampung Pepadun untuk mendapatkan gelar adat tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Tetapi setiap orang memiliki peluang selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat *Cakak Pepadun*. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayar sejumlah uang (*Dau*) dan memotong sejumlah kerbau.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan adat Lampung Pepadun dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari masyarakat yang dianggap mempunyai untuk dimintai keterangan dan para Penyimbang Kampung Tanjung Harapan. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan pustaka.

Hasil dari penelitian ini dari sisi tinjauan fiqh siyasah tentang kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan terdapat beberapa kesenjangan dengan kepemimpinan perspektif fiqh siyasah. Alasannya bahwa kepemimpinan adat Pepadun termasuk kedalam sistem pemerintahan monarki, dimana Penyimbang Anek dan Penyimbang Marga dapat naik tahta tanpa berdasarkan pilihan rakyat atau masyarakat melainkan melalui suksesi secara turun temurun dan untuk menjadi seorang Penyimbang harus melaksanakan *begawi Cakak Pepadun*. Sebab dalam kepemimpinan Islam tidak ada keharusan calon pemimpin dari keturunan pemimpin sebelumnya namun Islam juga tidak melarang untuk calon pemimpin itu boleh dari keturunan pemimpin sebelumnya dan Islam menganjurkan dalam pengangkatan seorang pemimpin dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama : Ayu Setiani
NPM : 1621020171
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Skripsi : **KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN**
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kampung Tanjung
Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung
Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

NIP. 1958081719931002

Pembimbing II

Drs.H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

NIP. 195703051978031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Frenki, M.S.i.

NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun, Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).** Disusun oleh, **Ayu Setiani, NPM : 1621020171,** program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah),** telah di Ujikan dalam sidang Munafiqsyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Senin, 15 Juni 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H.

Penguji I : Mohammad Yasir Fauzi, M.H.

Penguji II : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji III : Drs.H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

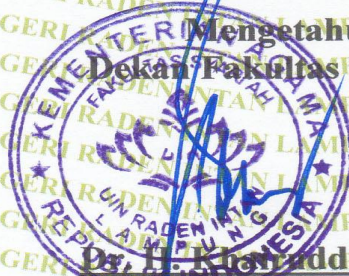
.....

.....

.....

.....

.....



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. Ahmad Jalaluddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَهَؤُلَاءِ خَيْرٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi Daud berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 247)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta Bapak Santoso dan Ibu Sunarsih yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Saudara-saudaraku mas Muh. Sururi, mas Ardi Susanto dan Kak Angga Pranata, yang senantiasa menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Kakekku Sahaludin terima kasih atas do'a dan nasihat yang telah kakek berikan.
4. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasa Syar'iyah Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 Oktober 1998, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Santoso dan Ibu Sunarsih. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Jayasakti Anak Tuha Lampung Tengah dari tahun 2005-2010. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Bustanul ‘Ulum Jayasakti Anak Tuha Lampung Tengah dari tahun 2011-2013. Setelah itu tahun 2013-2016 penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Bustanul ‘Ulum Jayasakti Anak Tuha Lampung Tengah.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah Program Studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN). Selama di kampus UIN Raden Intan Lampung penulis terpilih masuk dan aktif di organisasi penerima beasiswa dari Bank Indonesia yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI) dari tahun 2018 sampai sekarang ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”**. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak Ibrahim, selaku Kepala Kampung Tanjung Harapan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kampung Tanjung Harapan, dan Bapak Abdullah selaku Penyimbang Adat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
8. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi mba Desti Nurtiasih, S.H., Angga Pranata, Salis, Allen, Ambar, Saras, Sapta, Dedi, Doni, Dion terima kasih atas bantuan dan arahnya selama ini.
11. Sahabat baikku Indah Saraswati, Amvera, Anisa (Ica), Yusha, Gustian, Ridho, Arif, Kiki, Rhanty, dan Ana terima kasih selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Siyasah Syar'iyah C terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir

13. Sahabat-sahabat KKN ku Resya, Ngimbar, Ferdy, Vinny, Siska, Mak Milda,
Yuk Rika, Suci, Dinda, Alqo, Elham dan Abah Farhan.

14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, 23 Desember 2019

Penulis

Ayu Setiani

NPM. 1621020171

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Signifikasi Penelitian	12
H. Metode Penelitian.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	19
1. Pengertian Kepemimpinan	19
2. Dasar Hukum Kepemimpinan.....	36
3. Kriteria Calon Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah.....	41
4. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah.....	46
5. Peran Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.....	61
6. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan.....	65
B. Tinjauan Pustaka	67

BAB III KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KAMPUNG TANJUNG HARAPAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Gambaran Umum Objek	71
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
2. Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun	77
3. Struktur Gelar Pemimpin Adat Lampung Pepadun	91
4. Kriteria Pemimpin Adat Lampung Pepadun	98
B. Deskripsi Data Penelitian	99
1. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Adat Lampung Pepadun	99
2. Peran Pemimpin Adat Lampung Pepadun	104

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.....	107
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan	111

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama-nama Kepala Kampung Tanjung Harapan	71
2. Luas Wilayah Kampung Tanjung Harapan	73
3. Jumlah Penduduk Kampung Tanjung Harapan.....	74
4. Jumlah Penduduk Kampung Tanjung Harapan per-Dusun.....	74
5. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Tanjung Harapan	75
6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Tanjung Harapan.....	76
7. Lembaga Kemasyarakatan Kampung Tanjung Harapan.....	77



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Penyimbang Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha	95
2. Struktur Gelar Pemimpin Adat Lampung Pepadun Kampung Tanjung Harapan	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulisan skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” dengan mendapat awalan “me” menjadi memimpin yang berarti menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedangkan yang melaksanakannya disebut pemimpin. Bertolak dari kata pemimpin itu berkembang istilah kepemimpinan.¹

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi orang, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1065.

² Velthzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 2.

2. Adat

Adat diartikan sebagai tata cara hidup, kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang lazim ditaati dan dilakukan secara turun temurun.³

3. Lampung Pepadun

Adalah orang-orang yang berdiam dibagian darat pada Provinsi Lampung.⁴ Menurut penulis disini adalah Lampung Pepadun merupakan salah satu kebuayan/marga yang ada di Provinsi Lampung. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (Penyimbang).

4. Perspektif

Perspektif adalah tinjauan, sudut pandang atau pandangan.⁵

5. Fiqh

Fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang pada perbuatan anggota, diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsili* (terinci).⁶ Secara sederhana fiqh berarti ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.

³ Hilman Hadi Kusuma Dkk, *Adat Masyarakat Lampung* (Kanwil Dekdikbuk Propinsi Lampung, 1990), h.4.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 101.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, Cet.40 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 12.

6. Siyasah

Siyasah mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Siyasah juga bisa diartikan sebagai pemerintahan dan politik.⁷

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) adalah bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap cara memimpin di dalam adat Lampung Pepadun dimana adat tersebut menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (Penyimbang).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong peneliti memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Peneliti memilih adat Lampung Pepadun untuk diteliti karena ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan adat Lampung Pepadun jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah khususnya Lampung Pepadun Marga Anak Tuha di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cetakan Kedua (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.25.

2. Alasan Subjektif

Adapun alasan subjektif adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang kepemimpinan adat Lampung Pepadun perspektif fiqh siyasah (studi di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)
- b. Permasalahan yang diteliti sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara).
- c. Belum ada yang memilih judul skripsi ini di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara)

C. Latar Belakang Masalah

Pemimpin adalah seluruh aktivitas atau kegiatan untuk mempengaruhi serta menggerakkan orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan.⁸

Pemimpin adalah seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi pikiran, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mempengaruhi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar masalah kekuasaan.⁹

⁸ Abdul Qodir Djailani, *Perjuangan Idiologi Islam Indonesia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 60.

⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 27.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah salah satu kajian sosiologis, baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Secara sosiologis kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi dari suatu peran yang memerintah.¹⁰ Tujuan utama dari sebuah kepemimpinan adalah menghasilkan sikap yang adil dan bijaksana untuk seorang pemimpin. Pada dasarnya, semua komunitas membutuhkan adanya seorang pemimpin. Keharusan membentuk seorang pemimpin dimulai dari kesadaran manusia bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menjadi panutan, teladan, pengarah dan pengayom untuk menjaga tatanan sosial manusia.¹¹

Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban baik oleh orang yang mengangkatnya maupun di hadapan Illahi. Ketika seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat, maka ia akan merasa bahwa dirinya adalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Pemimpin untuk semua rakyat, berdiri diatas dan untuk semua golongan, suku dan warna. Walaupun seorang pemimpin diangkat dari suatu golongan tertentu, namun dalam kepemimpinannya ia akan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana.¹²

Eksistensi sebuah komunitas tertentu tergantung pada pola kepemimpinan yang diterapkan oleh penguasa. Pada zaman dahulu, pola kepemimpinan yang diterapkan adalah pola kepemimpinan Monarki, dan akhir-akhir ini disebut dengan pola kepemimpinan tradisional. Dalam kepemimpinan tradisional atau sekarang sering disebut kepemimpinan adat, proses pelimpahan kekuasaan

¹⁰ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 96.

¹¹ J. Riberu, *Dasar-Dasar Kepemimpinan* (Jakarta: Padoan Ilmu Jaya, 2005), h. 15.

¹² Ahmadi Sofyan, *Islam on Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), h. 2.

berdasarkan pada warisan dari keturunan ayah, maka sang anak laki-laki tertua akan memegang kepemimpinan setelahnya dan hak-hak keturunanpun diakui, oleh karena itu kepemimpinan tradisional atau kepemimpinan adat diterima oleh kelompoknya.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Berbagai suku dan kebudayaan tersebut tersebar di Indonesia. Mereka hidup dengan berkelompok ada yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan, bahkan pedalaman. Dari keanekaragaman tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah dalam melangsungkan kehidupan.

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua etnik asli Lampung yaitu etnik Saibatin dan etnik Pepadun. Masyarakat adat Pepadun adalah salah satu dari kedua kelompok adat besar masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Masyarakat Lampung Pepadun terbagi dalam beberapa perserikatan adat yang disebut Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga), Mego Pak Tulang Bawang (Marga Empat Tulang Bawang), Buway Lima Way Kanan (Lima Keturunan Way Kanan), Sungkai Bunga Mayang dan Pubiyan Telu Suku (Pubiyan Tiga Suku).¹³

Budaya kepemimpinan adat Lampung Pepadun cenderung bersifat tertutup karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Kedudukan adat tertinggi dalam suatu

¹³ Kherustika, Zuraida.DKK. *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bandar Lampung: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 1999), h. 2.

keluarga berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan *Penyimbang*. Gelar adat tertinggi ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Kata “*Pepadun*” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Begawi Cakak Pepadun*. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat atau dikenal dengan istilah *Juluk Adok* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*Dau*) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di dalam *Sessat* (Balai Adat tempat pertemuan para Perwatin Lampung Pepadun) dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Kedudukan *Penyimbang* begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.¹⁴

Kedudukan adatnya turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua, jika sang ayah keturunan Pepadun dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anakpun memegang tampuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannya pun diakui. Struktur kepemimpinan adat setiap komunitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komunitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang

¹⁴ Sarah Fadhilah Baihaqi, “Pewarisan Nilai Budaya melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 12.

bersangkutan. Seperti pada masyarakat Kampung Tanjung Harapan, pangkat adat tertinggi adalah bergelar *Suttan*, jika *Suttan* yang anaknya telah melakukan *Begawi Cakak Pepadun* maka gelar *Suttan* berganti menjadi *Minak*.

Berbeda dengan adat Lampung Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Lampung Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat *Begawi Cakak Pepadun*. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui *Begawi Cakak Pepadun* diantaranya gelar *Suttan*, *Rajo*, *Pengiran*, dan *Dalom*.¹⁵

Proses pelimpahan wewenang dalam kepemimpinan adat Lampung Pepadun mempunyai ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisional yang menganut pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang berdasarkan garis keturunan. Dalam kepemimpinan adat Lampung Pepadun untuk mendapatkan gelar adat harus memenuhi syarat-syarat seperti mempunyai garis keturunan anak laki-laki tertua (*Penyimbang*), beragama Islam, dewasa (*baligh*). Selain itu untuk menduduki struktur kepemimpinan adat Pepadun yaitu melalui upacara *Begawi Cakak Pepadun*.¹⁶

¹⁵ Fikha Frischilia, Adat Masyarakat Lampung Pepadun (On-line), tersedia di: <http://malahayati.ac.id/?p=15348> (10 Mei 2019)

¹⁶ Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai* (Jakarta: Cita Insan Madani, 2012), h.31.

Sementara itu kepemimpinan menurut fiqh siyasah selain prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip penegakan keadilan, kepemimpinan juga mempunyai prinsip *syura'* (musyawarah). Dengan bermusyawarah kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada satu tujuan yang universal. Strategi untuk mencapai tujuan beragam sehingga musyawarah bukan hendak menenyapkan suatu perbedaan pendapat melainkan demi kepentingan umum, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai tujuan. Istilah kepemimpinan disinonimkan dengan istilah *Khilafah* dan *Imamah*, keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan, yakni kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.¹⁷

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Hal tersebut di atas merupakan suatu sikap sekaligus peran yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin sebagai langkah untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang dapat menjadi suritauladan bagi rakyatnya, dan tanda-tanda kepemimpinan yang demikian terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 149.

Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kepemimpinannya menggunakan sendi-sendi *akhlaqul karimah*.

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* dalam proses pemilihan pemimpin, mencontohkan sikap persamaan, baik hak dan kewajiban, martabat serta kesempatan sebab dalam Islam kepemimpinan bukanlah dari golongan elit, melainkan semua Muslim diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karenanya nilai-nilai musyawarah dalam Islam cukup dikedepankan. Hal ini terlihat jelas setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada proses pengangkatan *Khulafaur Rasyidin*, yang berdasarkan ketentuan *Syar'i* dan suri tauladan yang diterapkan sebelumnya. Agar apa yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* dapat dilaksanakan di masa sekarang, maka seorang pemimpin harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu beragama Islam, laki-laki, dewasa (*baligh*) dan berilmu.¹⁸

Pembahasan di atas, terlihat beberapa perbedaan antara kepemimpinan adat yang diterapkan di masyarakat adat Lampung Pepadun. Perbedaan yang dimaksud adalah penerapan bentuk dan kriteria calon pemimpin pada adat Lampung Pepadun dan kepemimpinan dalam dalam fiqh siyasah. Kepemimpinan adat Lampung Pepadun harus menurut garis keturunan dan melaksanakan upacara *Begawi Cakak Pepadun*. Sementara kepemimpinan dalam pandangan fiqh siyasah tidak memberikan batasan dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua kaum muslim asalkan memenuhi

¹⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 228.

kriteria seperti yang dijelaskan di atas, dan pada proses pengangkatannya pun tidak dengan cara yang berlebihan, melainkan dengan cara sederhana dan dengan nuansa kerakyatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai kepemimpinan adat Lampung Pepadun dalam perspektif fiqh siyasah di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang cara menjadi pemimpin adat Lampung pepadun di kampung Tanjung Harapan dan pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Lampung pepadun di kampung Tanjung Harapan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Cara Menjadi Pemimpin Adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kepemimpinan adat Lampung Pepadun, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
2. Secara praktis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan, memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian

untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan kemudian disimpulkan.²⁰

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat

¹⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti. penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemimpin adat dan Penyimbang yang turut aktif dalam acara adat yang ada di masyarakat Kampung Tanjung Harapan. Pertimbangan ini karena tidak semua orang yang dari keturunan Penyimbang paham dengan adat. Adapun jumlah sampelnya adalah sebanyak 4 orang yaitu Abdullah (Gelar Ratu Pemegat Adat), Zainal Abidin (Gelar Junjungan Sako), Ibrahim (Gelar Minak Adat), Abdullah Riyo (Gelar Pengiran Riyo Penyimbang).
- 2) Masyarakat yang dinilai memumpuni untuk dijadikan sampel, dalam hal ini yaitu masyarakat yang bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti diambil dari masyarakat yang bertempat tinggal asli di tempat penelitian. Adapun jumlah

²¹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.42.

sampelnya adalah 3 orang yaitu keturunan asli *Sangai*. Jumlah sampel seluruhnya adalah 4 orang + 3 orang = 7 orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Data adat tersebut diperoleh dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memberikan keterangan tentang adat Lampung Pepadun dan data-data yang tepat dari lokasi penelitian yaitu di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, hadist, buku-buku fiqh siyasah, buku-buku tentang adat, dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan

secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²² Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang memiliki kapasitas untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini digunakan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengulas dan mencatat secara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti.²³ Jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kepemimpinan adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Fiqh Siyasah.

²² Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?...*, h.187.

²³ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 125.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.²⁴ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data dari Kampung Tanjung Harapan ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah, dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.

b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁵

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

c. Interpretasi Data

Merupakan suatu kegiatan menafsir suatu objek pemahaman menjadi bentuk pemahaman peneliti itu sendiri.²⁶ Pada penelitian ini, interpretasi digunakan untuk memahami atau menafsirkan mengenai adat Lampung Pepadun di Kampung Tanjung Harapan.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode Kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat Deskriptif Kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan adat Lampung Pepadun perspektif fiqh siyasah. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷

²⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 46.

²⁷ Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UII Press, 1995, h. 32.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan Secara Umum

Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.²⁸

Kepemimpinan atau *leadership* adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Akan tetapi, masing-masing kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah orang yang dengan kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Kepemimpinan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian istilah memimpin adalah peran seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan berbagai cara.³⁰

²⁸ R.B Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 25.

²⁹ Beni Ahmad Saebani & Ii Sumantri, *Kepemimpinan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 26.

³⁰ *Ibid.*, h.17.

Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader*, sedangkan kegiatannya disebut kepemimpinan atau akrab disebut dengan *leadership*. Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat memengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu.³¹

Sondang P. Siagian menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk berfikir atau bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi.³²

Kepemimpinan menurut Suradinata adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³³

Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa kepemimpinan sebagai pengaruh, seni mempengaruhi dan mengarahkan sedemikian rupa untuk kepatuhan sukarela mereka, kepercayaan diri, rasa hormat, dan kerja sama untuk menyelesaikan misi.³⁴

³¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39.

³² Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* (Jakarta : Haji Masa Agung, 1991) h. 24.

³³ Beni Ahmad Saebani & Ii Sumantri, *Kepemimpinan....., Ibid.*, h.31.

³⁴ Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.2

Kepemimpinan lebih memiliki arti luas, pemimpin merupakan spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap sebagai pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisi melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.³⁵

b. Kepemimpinan Adat Lampung

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Max Weber membagi kepemimpinan menjadi tiga macam yaitu tradisional, rasional dan karismatik.³⁶ Pengertian pertama, kepemimpinan tradisional mendapatkan wewenangnya di masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan di masyarakat secara tradisional. Biasanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, atau didapat secara turun temurun berdasarkan tradisi yang diwarisi, seperti raja.

Kedua, kepemimpinan rasional adalah kepemimpinan yang wewenangnya di dasarkan pada hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Pada masyarakat yang menerapkan nilai-nilai demokratis, biasanya pemimpin yang mendapatkan kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Wewenang rasional biasa disebut sebagai

³⁵ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.196.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.280-285.

wewenang absah atau legal atau birokrasi. Contohnya seperti presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, camat dan kepala desa.

Dan ketiga, kepemimpinan karismatik yaitu didasarkan pada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang didapatkan karena anugerah. Wewenang ini tidak diatur oleh kaidah-kaidah tradisional dan rasional, bahkan sifatnya cenderung irasional. Adakalanya wewenang karismatik bisa hilang dari seorang pemimpin manakala masyarakatnya sendiri telah berubah dan mempunyai faham yang berbeda. Dan karisma bisa saja bertahan dan bahkan meningkat sesuai dengan individu yang bersangkutan membuktikan manfaat bagi masyarakat dan pengikut-pengikutnya akan menikmatinya.

Kepemimpinan adat Lampung jika dilihat dari tipe kepemimpinan diatas termasuk kedalam tipe kepemimpinan tradisional. Dimana kepemimpinan adat Lampung ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masyarakat Lampung itu sendiri, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan.

Kepemimpinan adat Lampung Pepadun adalah kepemimpinan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut dengan *Penyimbang*. Gelar *Penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Lampung Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan

kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.³⁷

Untuk memperoleh gelar *Penyimbang* ini yaitu melalui upacara *Begawi Cakak Pepadun*. *Cakak pepadun* adalah peristiwa pelantikan penyimbangan menurut adat istiadat masyarakat adat Pepadun, yakni *begawi adat* yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang akan berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai *penyimbang* adat. Pepadun adalah suatu benda berupa bangku yang terbuat dari bahan kayu yang merupakan lambang dari tingkatan kedudukan dalam masyarakat mengenai suatu keluarga keturunan.³⁸

Menurut Sabbarudin *Cakak Pepadun* adalah peristiwa pelantikan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun yakni *Begawi Adat* yang dilaksanakan bagi seseorang yang akan berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai *Penyimbang* yang dilakukan oleh Lembaga Perwatin Adat.³⁹

Kelompok masyarakat adat Pepadun terdiri dari 4 (empat) klen besar yang masing-masing dibagi menjadi beberapa klen yang disebut dengan *Kebuayan* atau *Buay*. 4 (empat) klen tersebut yaitu terdiri dari :

³⁷ Fikha Frischilia, Adat Masyarakat Lampung Pepadun (On-line), tersedia di: <http://malahayati.ac.id/?p=15348> (08 Oktober 2019)

³⁸ Barmawi, BY (Ed), *Pakaian Upacara dalam Begawi Cakak Pepadun* (Bandar Lampung: Museum Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2008), h.14.

³⁹ Sabbaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012), h.14.

- 1) Abung Siwo Mego yang mempunyai sembilan Kebuayan terdiri dari Buay Nunyai, Nuban, Unyi, Subing, Anak Tuha, Selagai, Kunang, Beliyuk dan Nyerupa.
- 2) Pubian Telu Suku yang mempunyai tiga suku yang terdiri dari suku Temapupus, Menyerat dan Buku Jadi.
- 3) Mego Pak Tulang Bawang terdiri dari 4 Kebuayan yakni Tegamoan, Buay Bulan, Buay Umpu dan Buay Aji.
- 4) Way Kanan/ Sungkai terdiri dari Kebuayan Semenguk, Bahuga, Berasakti, Baradatu dan Pemuka.

Adat istiadat dalam masyarakat adat Lampung khususnya adat Lampung Pepadun ditandai dengan upacara-upacara adat besar dengan pemberian gelar atau *juluk adok*. Dalam kedudukan adat setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adatnya, yaitu dengan melakukan upacara *Begawi Cakak Pepadun*. Syarat untuk melakukan *Begawi Cakak Pepadun* adalah membayar sejumlah uang yang disebut *Dau* dan memotong sejumlah kerbau. semakin tinggi tingkat adat yang ingin dicapai, semakin banyak uang yang harus dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong. Seseorang yang ingin menaikkan statusnya sebagai Penyimbang atau pemimpin adat harus lebih dulu disahkan dan diakui oleh penyimbang-penyimbang yang setingkat dilingkungan daerahnya.⁴⁰

⁴⁰ Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan, 2004.h.2.

c. Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴²

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa-* *yasusu-* *siyasah* , yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴³ Pengertian menurut bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan

⁴¹ Muzar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2014), h. 3.

⁴³ *Ibid.*, h.3.

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah di dalamnya membicarakan mengenai tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara dalam pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Beberapa ulama ketatanegaraan Islam berpendapat mengenai pengertian fiqh siyasah. Diantaranya adalah Muhammad Iqbal, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁴

Sementara Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁵ Ibnu Taimiyah juga turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum

⁴⁴ *Ibid*, h. 4.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 26.

⁴⁶ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta, Gozian Press, 2013), h. 50.

Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Terkait urusan ibadah siyasah tidak terlalu banyak campur tangan, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah.

Istilah pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik* dan *Sulthan*.⁴⁷ Kata kepemimpinan sendiri dalam fiqh siyasah yaitu *Imamah* dan *Khalifah* yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi negara dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang dapat mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.⁴⁸

Berkaitan dengan masalah kepemimpinan, terdapat tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan. *Pertama*, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada posisi atau status yang ia miliki. Di dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum. *Kedua*, tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan

⁴⁷ Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif menurut Ahli, (On-line), tersedia di: <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqh-siyasah.html?m=1> (14 September 2019)

⁴⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Cet.2* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 9.

tentang kesucian tradisi lama. Dalam hal ini, status seorang pemimpin ditentukan oleh adat-kebiasaan lama yang dipraktikkan oleh masyarakat didalam tradisi tertentu. *Ketiga*, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan di dalam diri seseorang. Di dalam perspektif Weber, kepemimpinan memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas kharismatik.⁴⁹

Terdapat beberapa metode yang digunakan sebagai acuan dalam mempelajari fiqh siyasah diantaranya ialah sebagai berikut :⁵⁰

1. Metode *Ijtihadi*;
2. Pendekatan *Qiyas* (Analogi);
3. Pendekatan *Ijma'*;
4. Pendekatan *Istihsan*;
5. Pendekatan *Maslahah Mursalah*;
6. Pendekatan *Istishhab*;
7. Pendekatan *'Urf* (Hukum Adat).

Apabila dikaitkan dengan teori tentang kepemimpinan, setiap pemimpin Islam selalu mengacu pada semua metode di atas dalam mengambil suatu kebijakan maupun dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mengacu pada beberapa metode dan pendekatan di atas yang menjadi dasar atau landasan untuk berfikir dan bertindak seorang

⁴⁹ Surahman Amin, FM Siregar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Study Al-Qur'an*, Volume No. 1 (23 Oktober 2015), h. 28.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin...*, h. 46.

pemimpin dalam Islam lebih mengikuti kepada tuntunan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Sedangkan teori kepemimpinan sendiri berawal dengan tindakan seorang pemimpin yang meninggalkan catatan-catatan sejarah yang dibukukan. Maka dalam hal ini teori kepemimpinan siyasah merupakan hasil tindakan seorang pemimpin Islam dalam hal ini semasa Rasulullah SAW, beserta para penerusnya yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sebuah dasar dan meninjau dari tujuh metode pendekatan yang penulis paparkan di atas.

Dalam fiqh siyasah terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain hanya berpegang teguh dengan landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist antara lain:⁵¹

1. Kedaulatan Tertinggi ditangan Allah SWT

Ketaatan kepada Allah merupakan kekuatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin....*,h.124-126.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan *ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 59)⁵²

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁵² Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 59, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)⁵³

3. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10, Allah SWT. Berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ^{٥٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat: 10)⁵⁴

4. Prinsip Musyawarah.

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuura ayat 38 Allah SWT Berfirman:

⁵³ Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 58, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002

⁵⁴ Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49) : 10, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syuura: 38) ⁵⁵

Jika berbicara mengenai sejarah mungkin yang patut dijadikan contoh atau tauladan bagi kita maupun bagi setiap pemimpin dalam memimpin masyarakat ataupun umat adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin Negara. Dengan sifat amanah, fathanah, tabligh, sidiq yang beliau miliki dan kemudian diteruskan oleh *khulafaur Ar-rasyidin* sebagai generasi estafet kepemimpinan umat Islam selanjutnya (*Khalifah*). Ia dinamakan *Khalifah* (pengganti, wakil) karena ia bertugas menggantikan dan mewakilkan peran Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya. Ia dapat dipanggil dengan sebutan “*Khalifah Rasulullah*” atau biasanya dapat dipanggil dengan sebutan “*Khalifah*”.⁵⁶

Dalam Islam, suri tauladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 :

⁵⁵ Al-Qur'an Surah Asy-syuura (42) : 38, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002

⁵⁶ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,..... h.36.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٦٨﴾

Artinya:

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul.

Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Secara rinci sifat-sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁵⁷

1. Shiddiq

Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya “*shiddiq*” dan “*amin*”. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.

⁵⁷ Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No. 33, Januari-Juni 2016.

2. Amanah

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya).

Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah SWT yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama.⁵⁸

3. Tabligh

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat Ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita

⁵⁸ Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No. 33, Januari-Juni 2016.

gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari.⁵⁹

Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Beliau sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan, “*kul al-haq walau kaana murran*”, yang artinya “katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya”.

4. Fathanah

Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa (*genius abqariyah*) dan kepemimpinan yang agung (*genius leadership - qiyadahabqariyah*).

Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah SWT. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT, kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah SWT untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan

⁵⁹ Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No. 33, Januari-Juni 2016.

mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman - firman Allah.

2. Dasar Hukum Kepemimpinan

Sejarah Islam sendiri telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Rasulullah, para Sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam mencari pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad SAW selain Rasulullah, juga sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Persoalan pertama yang muncul kepermukaan setelah Nabi wafat adalah persoalan suksesi. Pentingnya persoalan pemimpin ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam. Allah telah memberitahukan kepada manusia, tentang pentingnya peran pemimpin dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya yaitu:

a. Surat An-Nisa (4) Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S. An-Nisa (4) : 58)⁶⁰

Syuhbah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Hajjah dari Ibn Juraij, dia berkata, ayat ini turun pada Usman bin Thalhah ketika peristiwa *Fath Makkah*. Setelah Rasulullah saw mengambil kunci Ka'bah darinya, beliau masuk ke Ka'bah bersamanya. Setelah keluar dari Ka'bah dan membaca ayat di atas, beliau memanggil Usman dan memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah dan membaca firman Allah di atas, 'Umar bin Khattab berkata '*sungguh saya tidak pernah mendengar beliau membaca ayat tersebut sebelumnya.*' Dari kata-kata 'Umar ini tampak bahwa ayat ini turun di dalam Ka'bah.⁶¹

Ayat ini merangkum dua kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu anjuran untuk menunaikan amanah dan berlaku adil dalam segala urusan. Dalam ayat ini ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, ini berarti perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.⁶²

⁶⁰ Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 58, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002

⁶¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Terj. Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.173.

⁶² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2, h. 481.

b. Surah An-Nisa (4) Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa (4) : 59)⁶³

Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan, “*Taatilah Allah, Ta’atilah Rasul, dan Taatilah Ulil Amri,*” melainkan “*Taatilah Rasul dan Ulil Amri,*” maka yang demikian itu berarti, taatilah *Ulil Amri* itu selama mereka itu menaati Allah dan Rasul-Nya dan selama perintah mereka berdasarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, tapi kalau perintah mereka hanya berdasarkan kepada pikiran semata, tidaklah wajib menaati perintah *Ulil Amri* itu.

Al- Qur’an surat An-Nisa ayat 58 berkaitan dengan kekuasaan (pemerintah) dan penguasa yang berkewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak (rakyat) dan menetapkan hukum dengan adil, sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan

⁶³ Al-Qur’an Surah An-Nisa (4) : 59, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, 2002.

rakyat, baik dari kalangan militer maupun kalangan sipil. Rakyat pun wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Dalam Islam menjadi pemimpin dan dipimpin adalah amanah yang pasti akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Membangun pemerintah yang baik menurut ayat ini bukan hanya peran penguasa saja akan tetapi rakyat juga ikut dalam menentukan arah pemerintahan tersebut. Karena bagaimana mungkin suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik jika hanya pemimpinnya saja yang taat membangun sistem sedangkan rakyatnya melawan sistem dan memerintahkan kepada maksiat.

Oleh karena itu, menurut surat An-Nisa ayat 58-59 terdapat 5 (lima) syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu:⁶⁴

1. Memberikan jabatan (amanah) kepada orang yang berhak dan terbaik (ahlinya)
2. Membangun dan menetapkan hukum yang seadil-adilnya
3. Mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat
4. Tetap pada ketaatan dan tidak boleh dalam kemaksiatan
5. Undang-undang tertinggi atau Konstitusi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-sunnah

⁶⁴ Yulida Leza, "Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah". (Skripsi Program Sarjana Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 24.

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah *Khalifah* yang berarti wakil atau pengganti, istilah ini dipergunakan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan merujuk kepada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah (2): 30)⁶⁵

Istilah lain pemimpin yang digunakan yaitu *Ulil Amri* yang berarti pemimpin yang tertinggi di dalam suatu masyarakat Islam dan *Imamah*. Namun istilah *Imamah* ini banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *Imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi *Imamah* untuk pembahasan *Khilafah* (Kepemimpinan). Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al-Hasan al-

⁶⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 30, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002.

Mawardi. Menurut al-Mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁶⁶

3. Kriteria Calon Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Sesudah Nabi Muhammad wafat, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang diangkat menjadi sebagai pemimpin. Hal ini mengakibatkan terjadinya perdebatan yang sangat tajam, perpecahan, serta peperangan politik berdarah dalam sejarah Islam. Tidak adanya petunjuk operasional dan lengkap tentang *khilafah* atau kepemimpinan dalam Islam, mengisyaratkan bahwa masalah kepemimpinan merupakan personal budaya manusia yang akan berkembang terus, bersamaan dengan perkembangan pikiran manusia dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak mencantumkan masalah kepemimpinan (*khilafah*) secara eksplisit.⁶⁷

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat. Ketujuh syarat-syarat itu lebih jelasnya sebagai berikut :⁶⁸

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum

⁶⁶ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,...,h.9.

⁶⁷ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*,.....h.101.

⁶⁸ *Ibid*,h.11.

3. Memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan bertindak.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, yang berdasarkan nash dan ijma'.

Dalam hal ini al-Mawardi merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad :

“ Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy”⁶⁹

Abu Ja'la al-Hambali menyebutkan terdapat empat syarat untuk menjadi pemimpin :⁷⁰

1. Haruslah orang Quraisy.
2. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, *baligh* berakal, berilmu dan adil.

⁶⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h.39.

⁷⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h.78.

3. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
4. Orang yang paling baik/ utama dalam ilmu dan agama.

Sementara menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat menjadi seorang pemimpin ada 10 (sepuluh), yaitu:⁷¹

1. Dewasa atau *aqil baligh*

Seorang pemimpin harus sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional ini seorang pemimpin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2. Otak yang sehat

Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental. Karena dimasa sekarang ini jika tidak dipimpin oleh pemimpin yang cerdas maka akan terjadi kepemimpinan yang otoriter dan korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

3. Merdeka

Yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal. Dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat secara maksimal.

4. Laki-laki

Syarat pemimpin selanjutnya adalah laki-laki. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 :

⁷¹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 183-184.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁷²

5. Keturunan Quraisy

Disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya pemimpin-pemimpin (umatku) itu (harus) dari suku Quraisy.”

6. Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat

Seorang calon pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca inderanya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal itu akan menghalanginya untuk bisa menjabat

⁷² Al-Qur'an Surah An-nisa (4): 34, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002.

sebagai pemimpin. Karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

7. Kekuasaan yang nyata

Tersedianya bagi pemimpin perangkat yang memadai, termasuk angkatan bersenjata dan kepolisian yang tangguh, yang dapat digunakan untuk memaksakan keputusan-keputusannya terhadap mereka yang hendak menentanginya, menindas pembangkang dan membasmi pemberontak.

8. Hidayah

Daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat dan nasihat orang lain.

9. Memiliki ilmu pengetahuan

Menurut para ulama, jabatan kepala negara tidak dapat disandang oleh seseorang yang ilmunya belum sedemikian tinggi sehingga mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang syariat.

10. Memiliki sifat *wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Kepala negara atau pemimpin harus memiliki budi pekerti atau akhlak yang luhur dan *wira'i*, yang memungkinkan dia mengembalikan segala masalah hukum dan syariat Islam kepada ulama dan cendekiawan.

Sementara menurut Imam Al-Haramain Al-Juaini mensyaratkan bahwa calon pemimpin saat ini tidak harus dari golongan Quraisy ataupun dari golongan pemimpin sebelumnya, karena syarat ini merupakan masalah yang diperselisihkan. Maka tidak boleh membuat statement pasti, apalagi masalah ini adalah lapangan ijtihad tidak boleh mutlak-mutlakan.⁷³

Lebih lanjut menurut Ibnu Khaldun dalam buku Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, menyatakan bahwa :

Pada masa Nabi Muhammad bahkan sampai sekarang beliau mengatakan pemimpin itu dari golongan Quraisy, karena Quraisy pada saat itu merupakan golongan yang kuat, mereka yang paling berwibawa memelihara keutuhan dan persatuannya umat Islam. Pemimpin yang berasal dari golongan demikian yang mampu mengurus kelompoknya dengan efektif, jika ada salah satu kelompok atau seorang yang bisa melebihi atau sama dengan kelompok Quraisy maka ia berhak memegang kepemimpinan.⁷⁴

4. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Perspektif Fiqh Siyasah

Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan Wahyu Illahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir.⁷⁵

⁷³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), h. 256.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 259.

⁷⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,.....h.21.

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam teori fiqh siyasah (politik Islam) dianggap sebagai persoalan yang paling mendasar. Sebagaimana dapat dipahami, Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantiannya itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam dikenal beberapa mekanisme penetapan seorang pemimpin atau kepala Negara dengan kriteria yang sesuai dengan sosio-historis yang ada. Sahnya jabatan pemimpin atau kepala Negara diwujudkan dengan dua cara:

- a. Menurut kelompok Syi'ah pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat;
- b. Menurut golongan Sunni pengangkatan pemimpin berdasarkan pilihan umat atau yang lazim disebut *syura'*. Alasannya karena tidak adanya nash yang *qot'i* (pasti) tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai umat Islam dan karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura'*.⁷⁶

Menurut Al-Mawardi mengenai pengangkatan *Imamah* (Kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara : *pertama*, pemilihan oleh *Ahlul 'Aqdi wal Hal* dan *kedua*, penunjukan oleh Imam (Khalifah) sebelumnya.⁷⁷

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khilafah melalui cara *istikhlaf* (Wasiat) dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*).⁷⁸

Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut

⁷⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*,..., h. 228.

⁷⁷ Imam Al-Mawardi, *Fiqh Siyasah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,...,h.12.

⁷⁸ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), h. 258.

ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan *bai'at* kepemimpinan. AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis Syura tersebut akan berembug dan sepakat memberikan *bai'at* pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syura sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Usman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Usman bin Affan ra.⁷⁹

⁷⁹ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), h. 258.

Kemudian Abu Zahroh lebih rinci menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Melalui Pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang.
- b. Pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya.
- c. Pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa penguasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.

Ketiga pola atau model pengangkatan kepemimpinan yang diungkapkan oleh Abu Zahroh di atas, mengacu pada proses pengangkatan pada masa *Khulafaur Ar-Rasyidin*. Dalam kasus *Khulafaur Ar-Rasyidin*, sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Al-Khattab ditetapkan sebagai khalifah berdasarkan penunjukan khalifah terdahulunya, Usman bin Al-Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan (tim formatur), dan Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan berdasarkan musyawarah dalam pertemuan terbuka.⁸⁰

⁸⁰ A. DJazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.

Melihat kembali sejarah peradaban Islam setelah wafatnya Rasulullah, sekaligus kepemimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin yang dianggap sama dengan pembahasan ini. Berikut sekilas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur rasyidin*:

a. Kepemimpinan Masa Rasulullah SAW

Sangat sedikit yang mengetahui dengan pasti tentang kehidupan dan keadaan Muhammad pada waktu muda yang menjadi pengetahuan umum, Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 M. di kota Mekkah.⁸¹ Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muthalib seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya dikalangan orang-orang Arab. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah, baik dari ayah maupun ibunya keduanya berasal dari Silsilah Nabi Ibrahim dan Ismail.⁸²

Pada waktu munculnya Nabi Muhammad Saw. bangsa Arab sedang melewati suatu masa jahiliyah, seluruh kehidupan Arab terjerumus kedalam kenistaan, pelanggaran sosial, penyembahan berhala dan politeisme merupakan tatanan masyarakat pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad Saw mulai menyiarkan agama Islam yang beliau terima dari Allah Swt di Mekkah. Kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan dibawah pimpinan suku bangsa Quraisy, akhirnya Nabi bersama sahabatnya hijrah ke Madinah karena tidak tahan terhadap kekejaman-kekejaman dan kebencian-kebencian yang brutal

⁸¹ Cyril Glasse, *Enslikopedi Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mashadi, Cet. V (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 275.

⁸² *Ibid.*, h. 276.

dari orang Quraisy, Nabi menyalurkan perhatiannya untuk mencari tempat baru bagi kegiatan dakwahnya, di Makkah Nabi telah memperoleh sekelompok pengikut yang sangat sedikit jumlahnya.

Berdasarkan catatan sejarah dapat diketahui bahwa, Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Terdapat dua aktifitas yang dilakukan setibanya di Madinah yaitu mendirikan Masjid Quba dan kota Madinah.⁸³ Hijrah merupakan titik balik dari karir Nabi Muhammad Saw. terhadap kebangkitan Islam. Nabi Muhammad Saw. mempunyai pengaruh yang mendalam dan mempunyai pengikut. Selama di Makkah, Nabi hanya berfungsi sebagai kepala agama dan tidak mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan karena kekuasaan politik yang ada di Makkah belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Di Madinah sebaliknya disamping menjadi kepala agama juga menjadi kepala pemerintahan.⁸⁴

Nabi Muhammad SAW tidak bisa tampil sebagai kepala negara di Makkah bukan semata karena faktor masyarakat mengenal ajaran tauhid tetapi lebih dari itu adalah dominasi kecemburuan sosial, kesamaan hak kekhawatiran hilangnya sumber ekonomi utamanya kekuatan tergesernya kemapanan sistem struktur kekuasaan para tokoh Quraisy apabila Islam berkembang dan menjadi agama masyarakat.

⁸³ Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 119. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 25.

⁸⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah dan Analisa Perbandingan* (Cet. V; Jakarta: UI Press), h. 3.

Proses Nabi Muhammad SAW memperoleh otoritas kepala negara bermula dari *bai'at al-aqabah* sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama yang konsekuensinya adalah terwujudnya masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasulullah. Dengan demikian, terbentuklah masyarakat muslim yang pertama dengan fungsi-fungsi sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara Madinah (kota).

Sistem yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan politiknya adalah syariah dengan mengutamakan politik musyawarah yang menekankan persamaan dan keadilan dalam mewujudkan kerja sama antara komunitas yang ada dengan otoritas sebagai Rasul dalam memutuskan berbagai masalah yang timbul.⁸⁵

Karakteristik kepemimpinan pada masa Nabi Muhammad selama 22 Tahun yaitu sebagai berikut: menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luar lainnya, mengutamakan segi keselamatan, mendahulukan hal-hal yang sifatnya mendesak, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, dan lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada dunia.⁸⁶

⁸⁵ Sutriani, Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara, *Jurnal Sulesana*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 201. h.153-154.

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*,...,h. 86-88.

Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana pergantian kepemimpinan setelah ditinggalkannya. Beliau tampaknya menyerahkan masalah ini kepada kaum Muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang dikalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, proses suksesi kepemimpinan politik dalam sejarah Islam berbeda-beda dari satu masa ke masa yang lain. Ada yang berlangsung aman dan damai, tetapi sering juga melalui konflik dan pertumpahan darah akibat ambisi tak terkendali dari pihak-pihak tertentu setelah Nabi wafat, terjadi pertentangan pendapat antara kaum Muhajirin dan Anshar di balai kota bani Sa'idah di Madinah. Masing-masing golongan berpendapat bahwa kepemimpinan harus berada dipihak mereka, atau setidaknya masing-masing golongan mempunyai pemimpin sendiri. Akan tetapi, karena pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah, ukhuwah yang tinggi, peradaban itu dapat diselesaikan.⁸⁷

b. Kepemimpinan Masa Khulafaur Ryasidin

1) Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah untuk mengganti kepemimpinan setelah Rasulullah SAW merupakan anugerah tersendiri, dan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui pemilihan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi Muhammad SAW wafat

⁸⁷ Yulida Leza, "Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah". (Skripsi Program Sarjana Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 35.

dan sebelum jenazahnya dimakamkan. Penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu karena terdorong keadaan.⁸⁸

Umar Bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang mengadakan pertemuan di Shaqifah atau balai pertemuan bani Saidah, Madinah untuk mengangkat Sa'ad Bin Ubadah, seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj, sebagai Khalifah. Kemudian Umar segera pergi kerumah kediaman Rasulullah dan menyuruh seseorang menghubungi Abu Bakar dan memintanya keluar. Awalnya Abu Bakar menolak, tetapi setelah diberi tahu terjadi peristiwa penting, Abu Bakar pun keluar. Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarah pergi kebalai pertemuan bani Saidah. Setelah perdebatan alot tersebut terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Umar bin Khattab lah yang pertama kali membai'at Abu Bakar dan menyatakan kesetiannya. Umar menyatakan bahwa Abu Bakar yang selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bila sakit dan Abu Bakar adalah sahabat yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW.

Diantara alasan Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar Shiddiq adalah *pertama*, Ia melihat keadaan yang sangat kritis dan gawat, sehingga tindakan pembaiatan, yang diakuinya sebagai

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*,...,h.90.

tindakan yang tergesa-gesa, dilakukan lebih cepat akan lebih baik. *Kedua*, ia memelopori, tetapi tidak berarti memaksakan pembaiatan Abu Bakar karena proses musyawarah telah dilakukan secukupnya. *Ketiga*, pilihannya kepada Abu Bakar adalah atas dasar kemampuan pribadinya, bukan karena faktor pertalian darah. *Keempat*, Umar melihat sosok Abu Bakar Shiddiq sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya.⁸⁹

Kebijaksanaan politik Abu Bakar Ash-Shiddiq tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya, antara lain sebagai berikut: memerangi kaum murtad, penumpasan nabi palsu, memerangi orang yang tidak membayar zakat, upaya perluasan melalui ekspansi wilayah dan kodifikasi Al-Qur'an. Abu Bakar mempunyai sifat yang berjiwa pemimpin dan bijaksana. Kebijakan Abu Bakar, antara lain: Musyawarah, sikap tegas dan terbuka untuk kritik.

2) Kepemimpinan Masa Umar Bin Khattab

Pada musim panas tahun 634 M, Abu Bakar menderita sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir 13 H/22 Agustus 634 M dalam usia 63 Tahun. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah sangat berbeda dengan Abu Bakar Ash Shiddiq. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Umar mendapat kepercayaan sebagai

⁸⁹ *Ibid.*, h. 93.

khalifah kedua tanpa melalui pemilihan dalam sistem terbuka sebagaimana ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah melalui penunjukan langsung dari Abu Bakar Ash Shiddiq.⁹⁰

Pada saat itu Umar langsung dibaiat oleh kaum Muslim, dan secara langsung diterima sebagai khalifah. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 H/ 634 M. Umar bin Khattab juga sangat tegas dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Dengan ketegasannya tersebut, Rasulullah SAW. Menyematkan gelar Al-Faruq, yang artinya pemisah atau pembeda. prestasi yang diraih Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah yaitu sebagai berikut, perluasan wilayah Islam, menata administrasi dan keuangan pemerintah dan penetapan kalender hijriah. Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, diantaranya :⁹¹

- a) Menjalankan petunjuk Rasulullah SAW;
- b) Bersikap tegas;
- c) Bertindak adil tanpa pandang bulu;
- d) Jujur dalam segala tindakan;
- e) Hidup dengan kesederhanaan;
- f) Mencintai dan selalu peduli kondisi rakyatnya;
- g) Rutin melakukan pengontrolan terhadap kehidupan rakyatnya;

⁹⁰ *Ibid.*, h. 98.

⁹¹ *Ibid.*, h. 104.

- h) Menunaikan semua hak bawahan dan rakyatnya;
- i) Memerintahkan dengan sikap keteladanan, bukan sekedar kata perintah.

3) Kepemimpinan Masa Usman bin 'Affan

Sebelum wafat, Umar bin Khattab telah memanggil tiga calon penggantinya, yaitu Usman, Ali dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Dalam pertemuan itu secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Di samping itu, Umar telah membentuk dewan formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan formatur yang dibentuk berjumlah enam orang yaitu, Ali, Usman, Sa'ad bin Waqqash, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidilah.⁹²

Mekanisme pemilihan khalifah ditentukan dengan tiga langkah. Pertama, yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Kedua, apabila suara terbagi secara berimbang (3:3), Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. ketiga, apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima, calon yang harus dipilih adalah Abdurrahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Tiga hari setelah Umar wafat, panitia enam ini melakukan sidang. Dari

⁹² Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*,....., h.106.

sidang inilah Usman bin 'Affan yang terpilih menjadi khalifah sebagai pengganti Umar.⁹³

Pada awal pemerintahannya, kebijaksanaan politik Usman tidak mengalami tantangan dan protes dari umat Islam. Usman dapat mengelola berbagai kepentingan dengan baik. Namun ini hanya berjalan selama enam tahun pertama pemerintahannya. Pada enam tahun kedua, Usman mulai diterpa badai protes dan ketidakpuasan rakyat dari berbagai daerah. Banyak kebijaksanaannya yang tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah. Setidaknya terdapat tiga sumber ketidakpuasan umat Islam terhadap Usman, sehingga menimbulkan kekacauan dalam pemerintahannya. Tiga hal tersebut adalah sosial politik, pendayagunaan kekayaan Negara, dan kebijaksanaan keimigrasian.

Dari sistem pemerintahan yang dijalankan Usman ini dapat dikemukakan beberapa catatan. *Pertama*, Usman lebih mengutamakan kaum keluarganya untuk menduduki jabatan penting adalah karena kepercayaannya yang terlalu besar kepada mereka. *Kedua*, hal ini yang tak kalah pentingnya adalah kebijakannya memberikan izin kepada Sahabat-sahabat senior untuk meninggalkan Madinah. Menyebarnya Sahabat-sahabat ke berbagai daerah menyebabkan kontrol terhadap Usman semakin berkurang. *Ketiga*, besarnya arus oposisi dari berbagai daerah

⁹³ Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*,....., h.106.

terhadap pemerintahan Usman dapat dipahami dalam konteks berbedanya perlakuan yang mereka alami antara pemerintahan Umar dan Usman. Pada masa Umar rakyat merasakan keadilan dan hak mereka di perhatikan, bahkan mereka dapat secara langsung menyampaikan kontrol dan kritik baik terhadap Umar sendiri sebagai Khalifah. Umar sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Sementara dalam pemerintahan Usman, rakyat melihat pola hidup pejabat-pejabat Negara yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap mereka. Puncaknya adalah peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Usman ditangan umat Islam sendiri.⁹⁴

4) Kepemimpinan Masa Ali bin Abi Thalib

Pengangkatan Ali menjadi khalifah keempat terjadi pada tahun 35 H/656 M, berawal dengan wafatnya khalifah ketiga, Usman bin 'Affan, yang terbunuh oleh sekelompok pemberontak dari Mesir yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 656 M. Setelah Usman bin 'Affan wafat, penduduk Madinah dengan didukung sekelompok pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah mencari pengganti Usman bin 'Affan sebagai khalifah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ibnu Umar. Pada awalnya tidak ada seorang pun dari mereka yang mau menjadi khalifah menggantikan Usman. Setelah berunding, akhirnya mereka mendatangi penduduk

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..., h. 83-85.

Madinah agar mengambil keputusan karena mereka dianggap ahli syura, yaitu yang berhak memutuskan pengangkatan khalifah. Pada saat itu, sosok Ali dinilai paling pantas menggantikan Usman.

Ali di baiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshar. Adapula para tokoh sahabat yang hadir seperti, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair. Diangkatnya Ali sebagai khalifah ditolak oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan dengan alasan Ali harus mempertanggungjawabkan terbunuhnya Usman dan Hak untuk menentukan jabatan khalifah bukan hanya orang-orang yang berada di Madinah, melainkan wilayah lainnya.

Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal berani dan tegas dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang Allah SWT, serta menindak segala macam kezaliman dan kejahatan. Khalifah Ali juga seorang yang memiliki kecakapan ilmu pengetahuan, bidang militer dan strategi perang.⁹⁵

Menurut Husain Haykal, bahwa:

“Dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun cara pengangkatan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan rujukan umat Islam, sebab masa-masa setelahnya tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melaksanakan

⁹⁵ Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*,..., h. 112-117.

pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin banyak menggunakan ijtihad”.⁹⁶

5. Peran Pemimpin dalam Fiqh Siyasa

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8-11 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janji mereka dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Mu'minun: 8-11)⁹⁷

⁹⁶ Sistim Pemilihan Kepala Negara Masa Khulafa Rasyidin dan Konteks Politiknnya” (On-Line), tersedia di:

https://www.academia.edu/34583260/SISTIM_PEMILIHAN KEPALA NEGARA MASA KHULAF RASYIDIN DAN KONTEKS POLITIKNYA. (01 Oktober 2019).

⁹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun (23) 8-11 : , Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002.

Pemimpin atau penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan disegala bidang. Ia akan mempertanggung jawabkan semua kebijakan yang diambil sewaktu di dunia yang menyangkut persoalan umat. Apabila dia adil, jujur, dan benar maka Allah akan senantiasa merahmatinya, tetapi jika dia dzalim dan menyelewengkan kekuasaannya, maka Allah akan melaknatnya, dan jika pemimpin itu sudah sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahkan.

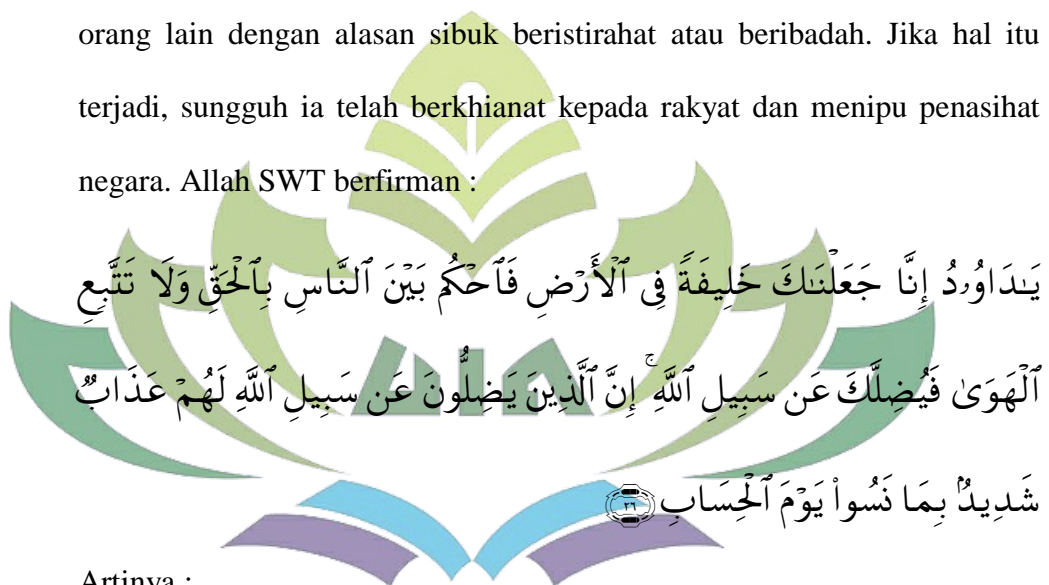
Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah:⁹⁸

- a. Menjaga agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli subhat yang merusak citra agama, seorang imam (khalifah) harus mampu menegakkan *hujjah* dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya dan memberikan sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.
- b. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih, dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang yang dzalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.

⁹⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,....., h.33-34.

- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *Mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
- f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin).
- g. Mengambil harta *fa'i* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai dengan yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
- h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).

- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional dalam bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, ditangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- j. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara. Allah SWT berfirman :



Artinya :

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shad (38) : 26)⁹⁹

⁹⁹ Al-Qur'an Surah Shad (38) : 26, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002

6. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan

Perkara yang paling asasi ditekankan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam proses mewujudkan dan melahirkan pemerintahan Islam adalah "soal kepemimpinan". Karena begitu pentingnya masalah ini sehingga para ulama baik yang klasik maupun modern merasa perlu menulis secara khusus tema ini dalam berbagai karyanya. Hal ini misalnya sebagaimana diungkapkan oleh al-Shahrastani. Ia mengatakan: *"permasalahan yang paling besar berlaku di kalangan umat Islam adalah tentang kepemimpinan (al-Imamah). Tidak pernah berlaku dalam zaman manapun, peperangan yang lebih besar di kalangan umat Islam dari pada yang berlaku karena masalah kepemimpinan."*¹⁰⁰

Pemimpin yang diinginkan oleh suatu negara pada dasarnya adalah sosok pemimpin yang bijaksana, merakyat, berpendidikan dan memiliki satu kepercayaan yang sama dengan masyarakat, agar tidak ada yang namanya kesalahpahaman serta tidak adanya perbedaan kepercayaan antara pemimpin dengan masyarakat.

Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sulthaniyah, kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya. Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan umat, yaitu *khilafah*, *imamah* dan *imarah al-mu'minin*. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu pemimpin

¹⁰⁰ Arsyad Sobby Kesuma, Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009.

pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia.¹⁰¹

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpin yang ditaati. Oleh karena itu agama dan pemimpin adalah saudara kembar atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalinya, sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalinya akan sia-sia.¹⁰²

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada *Syara'* dan *ijma'* sahabat dan *tabi'in*. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membai'at Abu Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu masyarakat dibiarkan dalam keadaan tidak berpemimpin, semuanya merupakan *ijma'* yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.

Abu Zahroh menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dengan tiga cara: *pertama*, melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang, *kedua*, pengangkatan atau penunjukan dari Khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya. *Ketiga*, pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih salah

¹⁰¹ Pandangan Tentang Khilafah Menurut Rasyid Ridha" (On-line), tersedia di: <http://perpuspendidikan.blogspot.com/2016/03/pandangan-tentang-khilafah-menurut.html?m=1> (28 September 2019)

¹⁰² Imam Ahmad Bin Hambal, *Mushab Imam Ahmad Bin Hambal, Juz II* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Libanon, 1993), h. 238.

satu diantara mereka. Pola kepemimpinan ini mengacu pada proses pengangkatan di masa Khulafaur Rasyidin.¹⁰³

B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulida Leza yang berjudul “Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kepemimpinan adat Saibatin dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun tiga jenis pengumpulan data yaitu dari metode observasi, *interview* dan pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi tinjauan pandangan fiqh siyasah tentang kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam terdapat beberapa kesenjangan dengan kepemimpinan perspektif fiqh siyasah. Alasannya bahwa kepemimpinan adat Saibatin termasuk kedalam sistem pemerintahan Monarki, di mana pemimpin tertinggi dapat naik tahta tanpa berdasarkan pilihan rakyat atau masyarakat melainkan melalui suksesi secara

¹⁰³ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*,...h.228.

turun temurun dan dikelompokkan dalam bentuk stratifikasi sosial yang bersifat tertutup, apalagi kekuasaan tertinggi dalam sistem Monarki berada di tangan seorang raja. Kepemimpinan adat Saibatin merupakan kepemimpinan yang tidak membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin adat. Sebab dalam kepemimpinan Islam tidak ada keharusan calon pemimpin dari keturunan pemimpin sebelumnya, namun Islam juga tidak melarang untuk calon pemimpin itu boleh dari keturunan pemimpin sebelumnya.

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Ainal Yaqin yang berjudul “Kepemimpinan Adat Semendo Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Uludanau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan adat Semendo di masyarakat adat semendo di desa Uludanau dan pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat semendo di desa Uludanau. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan adat Semendo yang berlaku di desa Uludanau yaitu terdapat dua kepemimpinan di dalam adat Semendo untuk ketua yang berlaku dalam satu desa ketua adat dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan asas demokrasi dimana setiap masyarakat boleh mencalonkan sebagai ketua adat dengan syarat pertama beragama Islam, kedua, mengerti tentang adat istiadat, dan ketiga tidak pernah melanggar adat. Yang kedua yaitu kepemimpinan adat *tunggu tubang*

merupakan kepemimpinan di dalam suatu lembaga keluarga dengan pemimpin tertinggi disebut *meraje*. *Meraje* disini tidak dipilih melainkan secara otomatis setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari jalur ibu adalah *meraje*. Dalam fiqh siyasah sendiri terhadap kepemimpinan adat semendo terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam pemilihan pemimpin dimana untuk kepemimpinan yang berlaku disuatu desa sudah sesuai dengan perspektif fiqh siyasah dimana setiap orang bisa mencalonkan diri, sedangkan kepemimpinan *tunggu tubang* pemimpinnya otomatis berdasarkan keturunan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti ada perbedaan dan persamaannya dengan skripsi penelitian seperti Skripsi Yulida Leza dengan judul Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Perbedaannya yaitu terletak pada model kepemimpinan adat. Peneliti membahas mengenai kepemimpinan adat Lampung Pepadun dimana kepemimpinan adat ini masih membuka peluang kepada orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan adat, sedangkan Skripsi Yulida Leza membahas tentang kepemimpinan adat Saibatin yang merupakan kepemimpinan yang tidak membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin adat. Begitupun dengan skripsi Ainal Yaqin yang berjudul Kepemimpinan Adat Semendo Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Uludanau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Perbedaannya bahwa dalam skripsi ini Ainal Yaqin meneliti tentang kepemimpinan adat Semendo dimana dihasil penelitian terdapat dua

mekanisme pengangkatan pemimpin adatnya, sementara peneliti membahas mengenai kepemimpinan adat Lampung Pepadun dimana mekanisme pengangkatan Penyimbang dengan melalui upacara *Begawi Cakak Pepadun*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Qodir Djailani, *Perjuangan Idiologi Islam Indonesia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Ahmad Sofyan, *Islam on Leadership*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Cet.2. Jakarta: Qisthi Press, 2017.

Amiruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. XII. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Barmawi, BY (Ed), *Pakaian Upacara dalam Begawi Cakak Pepadun*. Bandar Lampung: Museum Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulala Ar Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Cyril Glasse, *Enslikopedi Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mashadi, Cet. V. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta: Cita Insane Madani, 2012.

Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah dan Analisa Perbandingan*, Cet. V. Jakarta: UI Press.

- Hilman Hadi Kusuma Dkk, *Adat Masyarakat Lampung*. Kanwil Dekdikbuk Propinsi Lampung, 1990.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Imam Ahmad Bin Hambal, *Mushab Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz II. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Libanon, 1993.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Terj. Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Keterem Recako Adat Mergo Anak Tuho. Bumi Aji, 2016.
- Kherustika, Zuraida.DKK. *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bandar Lampung: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 1999.
- Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical*, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.
- Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husaen Haykal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- R.B Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2005.

- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press, 2013.
- Riberu J, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, Pedoman Ilmu Jaya .Jakarta: 2005.
- Sabbaruddin Sa, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.
- Sarah Fadhilah Baihaqi, “Pewarisan Nilai Budaya melalui Simbol Gelar Adat Lampung Buay Nunyai”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Masa Agung, 1991.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Suyuthi Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta, Rajawali, 1997.
- Velthzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Veithzal Rivai, Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yulida Leza, “*Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi Program Sarjana Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.

Jurnal

- Annisa Valentina, Kontestasi Gelar Adat “*Suttan*” dalam Panggung Politik Lampung, *Artikel JISPO*, Vol.8 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Arsyad Sobby Kesuma, Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009.

Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No. 33, Januari-Juni 2016.

Surahman Amin, FM Siregar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Study Al-Qur'an*, Volume No. 1, 23 Oktober 2015.

Sutriani, Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara, *Jurnal Sulesana*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2011.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2.

Wawancara

Abdullah (Gelar Ratu Pemegat Adat), Wawancara dengan penulis, Kota Metro, 2 November 2019.

Abdullah Riyo (Gelar Pengiran Riyo Penyimbang), wawancara dengan penulis, 15 Oktober 2019.

Ibrahim (Kepala Kampung Gelar Minak Adat), Wawancara dengan penulis, Kampung Tanjung Harapan, 15 Oktober 2019.

Kanjeng Badrie Siwo Ruang, Wawancara dengan penulis, Kampung Padang Ratu, 30 Oktober 2019.

Suep, wawancara dengan penulis, Kampung Tanjung Harapan, 16 Oktober 2019.

Supriyanto, Wawancara dengan penulis, Kampung Tanjung Harapan, 15 Oktober 2019.

Zainal Abidin (Gelar ST. Junjungan Sako), wawancara dengan penulis, 15 Oktober 2019.

Sumber On-line

Fikha Frischilia, Adat Masyarakat Lampung Pepadun (On-line), tersedia di: <http://malahayati.ac.id/?p=15348> (08 Oktober 2019)

Pandangan Tentang Khilafah Menurut Rasyid Ridha” (On-line), tersedia di: <http://perpuspendidikan.blogspot.com/2016/03/pandangan-tentang-khilafah-menurut.html?m=1> (28 September 2019)

Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif menurut Ahli, (On-line), tersedia di: <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqh-siyasah.html?m=1> (14 September 2019)

Sistim Pemilihan Kepala Negara Masa Khulafa Rasyidin dan Konteks Politiknya”
(On-Line), tersedia di:
https://www.academia.edu/34583260/SISTIM_PEMILIHAN KEPALA_NEGARA_MASA_KHULAFAR_RASYIDIN_DAN_KONTEKS_POLITIKNYA.
(01 Oktober 2019).

